

**EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO**

TUGAS AKHIR

Oleh:

REZA PRAMANA

2203100064

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2026

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : REZA PRAMANA
NPM : 2203100064
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Hari, tanggal : Kamis 09 April 2026
Waktu : Pukul 08.15 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.SOS., M.SI (.....)
PENGUJI II : WINDA S MELIALA, S.SOS., MSP (.....)
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.SOS., M.H (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Pd. Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.KOM
0030047402 2126128302

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh;

Nama : REZA PRAMANA
NPM : 2203100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Fungsi Organizing Dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

Medan, 28 Februari 2026

Pembimbing



SYAFRUBDIN, S.Sos., M.H
NIDN : 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.
NIDN : 0122118801



Assoc. Prof. Dr. MARTIN SALEH, S.Sos., M.SP.
NIDN / 0030017402

USU
Unggul dalam Pelayanan | Terpercaya

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Reza Pramana**, NPM 2203100064 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Mei 2026

Yang menyatakan



Reza Pramana

EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

Reza Pramana
2203100064

ABSTRAK

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan kebijakan nasional yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan berbasis lingkungan di tingkat lokal. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi manajerial, khususnya fungsi organizing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pimpinan dan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ProKlim. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pembagian tugas antarbidang masih belum terintegrasi secara menyeluruh, dan koordinasi lintas sektor belum berlangsung secara konsisten. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan ProKlim yang cenderung terfokus pada kegiatan tertentu, seperti pengelolaan sampah, sementara aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lainnya belum dikembangkan secara seimbang. Oleh karena itu, penguatan struktur organisasi, kejelasan peran, serta peningkatan mekanisme koordinasi lintas pihak menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

Kata kunci: efektivitas, fungsi organizing, Program Kampung Iklim, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Karo.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **"Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo."** Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji serta rasa syukur kepada Allah SWT sebagai sumber kekuatan utama dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti, baik secara moril maupun materil,

sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Strata Satu. Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam penulis sampaikan kepada **Ayah tercinta, Misiadi Manggara**, atas segala kerja keras, pengorbanan, keteguhan, serta doa yang tidak pernah putus dalam membimbing dan mendukung penulis. Keteladanan, nasihat, dan semangat yang diberikan Ayah menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi Strata Satu ini. Segala pencapaian penulis tidak terlepas dari peran dan doa mereka. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada **Ibu tercinta, Sumini**, atas kasih sayang yang tulus, perhatian yang tiada henti, doa yang senantiasa dipanjatkan, serta kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa. Dukungan dan keikhlasan Ibu menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
2. Bapak Assoc. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Assoc. Dr. Dra. Hj. Yurisna Tanjung , M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin S.Sos., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administrasi kepada penulis.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
11. Seluruh pegawai dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi selama penelitian berlangsung.

12. Narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada saudara-saudara tercinta saya Rahayu Indri Astuti dan Rizky Rafana Afrilliansyah Akbar yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan pengelolaan lingkungan, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Medan, 5 Februari 2026
Penulis

Reza Pramana
2203100064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Efektivitas	8
2.1.1. Pengertian Efektivitas	8
2.1.2. Jenis-Jenis Efektivitas	10
2.1.3. Indikator Efektivitas.....	11
2.2. Organizing (Pengorganisasian)	12
2.2.1. Pengertian Organizing.....	12
2.2.2. Karakteristik Organizing	14
2.2.3. Fungsi Organizing	14
2.2.4. Tujuan Organizing.....	15
2.2.5. Ciri-Ciri Organizing	16
2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizing	17
2.3. Hubungan Organizing Dengan Program Kampung Iklim	18
2.4. Program Kampung Iklim (ProKlim).....	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Kerangka Konsep	24

3.3. Definisi Konsep.....	24
3.4. Kategorisasi.....	25
3.5. Narasumber	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Teknik Analisis Data	28
3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	30
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	30
3.9.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo	30
3.9.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.....	32
3.9.3. Struktur Organisasi Kelurahan Helvetia Tengah.....	34
BAB I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	40
4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1. Analisis Hasil Wawancara	48
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Simpulan	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

3.1. Tabel Kerangka Konsep	24
4.1. Tabel Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin	37
4.2. Tabel Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	38
4.3. Tabel Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	39

DAFTAR GAMBAR

3.1. Gambar Dinas Lingkungan Hidup	32
3.2. Gambar Organisasi Lingkungan Hidup	34
4.1. Gambar Sosialisasi Program.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Draft Wawancara
Lampiran II	: SK-1 Permohonan Penetapan Judul
Lampiran III	: SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
Lampiran VIII	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran IX	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran X	: Surat LoA
Lampiran XI	: Dokumentasi
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Ujian Tugas Akhir
Lampiran XIII	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Program Kampung Iklim atau ProKlim merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini dirancang untuk memperkuat aksi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis lokal. ProKlim mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan ketahanan pangan, konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, hingga pengendalian penyakit akibat perubahan iklim. Cakupan kegiatan yang luas ini menuntut sinergi antara Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar ProKlim dapat berjalan efektif.

Pelaksanaan ProKlim memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 secara khusus mengatur tentang pelaksanaan Program Kampung Iklim, termasuk mekanisme pembinaan, penilaian, dan pelaporan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Kerangka hukum ini

menegaskan bahwa ProKlim merupakan bagian integral dari kebijakan nasional menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Kabupaten Karo merupakan salah satu Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang telah mengadopsi Program Kampung Iklim melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Daerah ini memiliki karakteristik ekologis yang khas dengan bentang alam pegunungan, lahan pertanian hortikultura, serta kawasan wisata seperti Berastagi dan Kabanjahe. Potensi ini sekaligus menghadirkan tantangan terhadap pengelolaan lingkungan, terutama karena peningkatan aktivitas pertanian, pariwisata, dan permukiman yang berpotensi memperbesar emisi dan menurunkan kualitas lingkungan. Dalam konteks inilah, ProKlim di Kabupaten Karo menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan menumbuhkan aksi komunitas desa dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

Pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo melibatkan berbagai organisasi dan aktor. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator teknis yang mengatur perencanaan, pembinaan, serta evaluasi kegiatan. Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada DLH, melainkan juga pada sinergi dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dalam perencanaan dan pembiayaan. Selain itu, peran Pemerintah kecamatan, desa, kelompok ProKlim, PKK, Karang Taruna, serta mitra swasta juga sangat menentukan. Kolaborasi lintas organisasi ini idealnya mencerminkan sistem kerja yang terstruktur, tetapi di lapangan masih sering berjalan parsial dan sektoral.

Peran Bappelitbangda Kabupaten Karo sangat krusial dalam hal ini. Sebagai lembaga perencana pembangunan Daerah, Bappelitbangda berperan dalam merancang kebijakan dan strategi lintas sektor agar program lingkungan, termasuk ProKlim, dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan program prioritas Pemerintah Kabupaten. Bappelitbangda juga bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai stakeholder, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis, hingga Pemerintah desa sebagai pelaksana di lapangan. Melalui pendekatan kolaboratif, lembaga ini mendorong penyusunan program ProKlim berbasis data wilayah dan potensi lokal yang sesuai dengan karakteristik ekologi dan sosial masyarakat Karo. Dukungan perencanaan dari Bappelitbangda mencakup penyediaan anggaran, sinkronisasi kegiatan antarinstansi, serta integrasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan Daerah.

Menurut Sucasih dkk (2024, hal. 7) menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di berbagai Daerah masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya kapasitas organisasi pelaksana di tingkat Daerah. Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo terletak pada aspek pengorganisasian atau organizing. Struktur organisasi pelaksana di DLH masih belum menunjukkan pembagian peran yang jelas antara bidang-bidang internal, sementara hubungan koordinatif dengan organisasi lain belum terbentuk secara efektif. Beberapa desa binaan melaporkan bahwa pendampingan kegiatan seperti konservasi air, penghijauan, atau efisiensi energi tidak berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, pelaksanaan ProKlim di

lapangan sering kali hanya menonjolkan kegiatan pengelolaan sampah karena dianggap lebih mudah diukur dan dilaksanakan, sementara aspek lain dari ProKlim belum mendapat perhatian yang seimbang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa substansi ProKlim yang seharusnya menyeluruh masih belum terwujud sepenuhnya di Kabupaten Karo.

Keadaan tersebut mencerminkan kondisi nyatanya, di mana ProKlim di Kabupaten Karo telah terlaksana tetapi masih berfokus pada isu tertentu dan belum terintegrasi secara penuh antar bidang. Idealnya atau dalam kondisi yang seharusnya, ProKlim dijalankan sebagai program kolaboratif yang melibatkan seluruh bidang terkait, dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang kuat. Fungsi organizing seharusnya berperan dalam memastikan adanya struktur kerja yang efisien, komunikasi lintas organisasi yang terarah, serta sistem pemantauan terpadu atas seluruh kegiatan ProKlim.

Penelitian ini menjadi penting karena efektivitas ProKlim tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kekuatan sistem organisasi Pemerintah Daerah yang mengelolanya. Fungsi organizing yang baik mampu mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dari berbagai instansi agar program tidak berjalan sektoral. Dengan menelaah efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana struktur organisasi, pola koordinasi, serta pembagian peran antaraktor berpengaruh terhadap keberhasilan program lingkungan berbasis komunitas di tingkat lokal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat praktik tata kelola kelembagaan Daerah agar ProKlim menjadi

gerakan adaptasi dan mitigasi iklim yang berkelanjutan dan berdaya guna. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO.”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam konteks meningkatnya tantangan dalam Program Kampung Iklim pentingnya fungsi manajerial dalam organisasi publik, penelitian ini berfokus pada upaya memahami “Bagaimana efektivitas fungsi organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu Penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya terkait implementasi fungsi organizing dalam tata kelola lingkungan berbasis program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini turut memberikan kontribusi pada pengembangan teori organisasi sektor publik dengan menekankan bagaimana pengaturan struktur, mekanisme koordinasi, pembagian

peran, dan keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan fungsi organizing, khususnya dalam pengaturan koordinasi, pembagian peran, integrasi kerja, dan kolaborasi lintas pihak pada pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan operasional yang lebih efektif guna memperkuat tata kelola lingkungan berbasis partisipasi masyarakat di daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian efektivitas, fungsi organizing, Program Kampung Iklim (ProKlim), dan hubungan program dengan organizingnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari narasumber

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator utama dalam administrasi publik yang menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara terukur, terarah, dan berdampak. Efektivitas tidak sekadar menilai output, tetapi juga menilai kesesuaian hasil dengan tujuan, kualitas proses kerja, serta dampaknya bagi sasaran kebijakan. Dalam sektor publik, efektivitas memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi privat karena tidak hanya berorientasi pada kinerja internal, tetapi juga pada kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas menjadi instrumen evaluasi yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan dampak sosial yang dihasilkan.

Menurut Nuraida (2019, hal. 4) efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan program, tetapi juga dari tingkat ketepatan sasaran, relevansi implementasi, serta keberterimaan manfaat oleh masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa program yang berjalan tanpa mengacu pada indikator pengukuran yang jelas tidak dapat dikategorikan efektif, sekalipun realisasinya berjalan tanpa hambatan teknis.

Menurut Febrian dan Maharani (2021 hal 39) menegaskan efektivitas dalam organisasi publik dapat diartikan sebagai perbandingan antara *outcome* dan output

program, di mana efektivitas dinilai dari dampak yang dialami setelah implementasi. Dalam perspektif ini, organisasi dapat dikatakan efektif jika kebijakan dan layanan yang dihasilkan mampu menjadi solusi nyata atas masalah publik yang mendasari lahirnya program tersebut. Artinya, efektivitas tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga keberhasilan substantif dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

Efektivitas bukan kondisi statis, melainkan kemampuan organisasi mempertahankan performa kebijakan agar tetap relevan, adaptif, serta memberikan dampak yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari capaian awal, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan kualitas implementasi dalam jangka panjang.

Dalam pengelolaan sampah, misalnya, efektivitas tercermin pada menurunnya residu sampah, meningkatnya cakupan layanan, membaiknya koordinasi kelembagaan, serta timbulnya perubahan perilaku publik dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas mencakup dimensi internal organisasi dan eksternal dampak layanan.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, efektivitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam menjalankan proses organizing untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal, terkoordinasi, tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan baik pada aspek tata kelola kelembagaan, kualitas layanan, maupun perubahan kondisi lingkungan dan respons publik.

2.1.2. Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas dalam kajian administrasi publik tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki tingkatan analisis yang berbeda sesuai dengan unit pengukuran kinerjanya.

Robbins dan Judge (2021, hal. 25) mengemukakan bahwa :

1. Efektivitas Individu menggambarkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Efektivitas Kelompok mencerminkan tingkat keberhasilan tim kerja dalam menyelesaikan pekerjaan secara kolaboratif dan efisien.
3. Efektivitas Organisasi merupakan hasil sinergi dari kinerja individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama secara menyeluruh.

Pembagian ini penting karena keberhasilan organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh capaian institusional, tetapi juga dipengaruhi oleh performa aktor pelaksana dan kolaborasi antar unit kerja. Dengan demikian, pengukuran efektivitas harus dipahami secara berlapis dan saling terhubung antara kapasitas sumber daya manusia, kerja kolektif, serta tata kelola organisasinya.

Efektivitas pada level individu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas, ketepatan menyelesaikan pekerjaan, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas individu menjadi fondasi awal yang menentukan kualitas pelaksanaan program, sebab kegagalan pada level individu akan berdampak pada koordinasi dan output organisasi secara keseluruhan.

Menurut Lestari (2020, hal. 101) bahwa komunikasi organisasi dapat menjalankan fungsi utama dalam proses pembagian peran, koordinasi, dan penyelarasan kerja antar-unit. Ia menekankan bahwa komunikasi ke bawah, ke atas, dan horizontal dapat meningkatkan kejelasan instruksi, memperkuat hubungan kerja, dan menciptakan keterlibatan anggota dalam penyelesaian program

2.1.3. Indikator Efektivitas

Pengukuran efektivitas organisasi dalam administrasi publik membutuhkan seperangkat indikator yang tidak hanya menggambarkan capaian administratif, tetapi juga kebermanfaatan program bagi masyarakat.

Menurut Ariani (2023, hal. 37-38), efektivitas organisasi publik dapat dilihat dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kesesuaian output, dan tingkat pemanfaatan hasil oleh kelompok sasaran. Indikator ini menegaskan bahwa keberhasilan kerja organisasi publik tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari akurasi hasil terhadap kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya.

Menurut Bowo dan Mahrudi (2022, hal. 106-110) Kepuasan publik seringkali dijadikan indikator output sosial dalam evaluasi efektivitas organisasi sektor publik. Pengukuran kepuasan mencakup aspek seperti keberlanjutan layanan kebersihan, kenyamanan lingkungan, dan respons lembaga terhadap pengaduan unsur-unsur yang merefleksikan dampak program bagi masyarakat pengguna layanan.

Indikator operasional mencakup ketepatan perencanaan, keterpaduan koordinasi, serta efisiensi pelaksanaan program, sedangkan indikator sosial mencakup dampak kebijakan terhadap kesehatan lingkungan, keterlibatan

komunitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Artinya, pengukuran efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup dimensi administratif sekaligus ekologis dan sosial.

Berdasarkan landasan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas yang mencakup:

- (1) ketepatan sasaran program,
- (2) ketepatan waktu pelaksanaan,
- (3) kesesuaian output dengan rencana,
- (4) tingkat kepuasan dan manfaat bagi masyarakat,
- (5) keberlanjutan dampak lingkungan, serta
- (6) keterpaduan koordinasi dan respons kelembagaan.

Dengan demikian, efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan teknis operasional, tetapi juga sebagai kemampuan mewujudkan perbaikan lingkungan yang terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.2. Organizing (Pengorganisasian)

2.2.1. Pengertian Organizing

Organizing dalam manajemen publik merujuk pada proses pengaturan sumber daya organisasi, termasuk manusia, sarana, alur koordinasi, serta mekanisme kerja, agar tujuan institusi dapat dicapai secara sistematis dan efisien. Dalam administrasi publik, fungsi organizing tidak hanya berfokus pada pembagian tugas dan wewenang, tetapi juga mencakup pembentukan struktur formal,

mekanisme koordinasi, serta sistem komunikasi yang mendukung efektivitas kelembagaan.

Menurut Rainey (2015, hal. 359) fungsi organizing dalam organisasi publik berperan strategis untuk menempatkan sumber daya secara proporsional dan terkoordinasi melalui prosedur operasional baku (SOP) dan mekanisme koordinasi, sehingga mengurangi risiko tumpang tindih kewenangan. Selain itu, struktur organisasi yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan sosial dan dinamika kebijakan agar pelayanan publik tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Transformasi fungsi organizing pada institusi publik saat ini mengarah pada penerapan konsep organisasi adaptif dan kolaboratif yang menekankan desentralisasi keputusan, penguatan peran unit kerja, serta percepatan alur koordinasi lintas bagian. Model organizing yang fleksibel ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih responsif, khususnya dalam pengelolaan isu strategis berbasis kewilayahan seperti lingkungan dan kebencanaan.

Kejelasan penugasan, alur pelaporan, serta mekanisme supervisi merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan fungsi organizing pada lembaga pemerintah. Ketidakjelasan struktur koordinasi dan pembagian peran dapat menghambat sinergi kerja, menurunkan efisiensi program, dan memicu fragmentasi antar unit organisasi. Dengan demikian, organizing tidak hanya menjadi fungsi administratif, tetapi juga instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi publik secara menyeluruh.

2.2.2. Karakteristik Organizing

Karakteristik organizing meliputi sejumlah aspek pokok yang membedakan pengorganisasian yang efektif dan yang kurang efektif. Salah satu karakteristik penting adalah adanya pembagian tugas yang jelas dan spesifik, sehingga setiap unit mengetahui tanggung jawabnya dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang-tindih

Menurut Sudrajat dkk (2025, hal. 33-48) bahwa restrukturisasi organisasi daerah yang mencakup penguatan koordinasi antar unit kerja meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan. Karakteristik lain adalah fleksibilitas struktur organisasi menunjukkan bahwa organisasi yang struktur internalnya terlalu kaku mengalami hambatan komunikasi dan adaptasi, sedangkan organisasi yang struktur-nya fleksibel cenderung memiliki jaringan komunikasi internal yang lebih efektif dan koordinasi lintas unit juga menjadi karakteristik utama.

Dengan demikian, karakteristik organizing yang baik mencakup: pembagian tugas yang spesifik, struktur organisasi yang adaptif, mekanisme wewenang dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi antar-unit yang efektif.

2.2.3. Fungsi Organizing

Menurut P.Robbins & Mary Fungsi organizing memiliki beberapa peran utama dalam manajemen organisasi publik, antara lain:

- (1) Melaksanakan tanggung jawab pimpinan,
- (2) Melakukan pemberian motivasi kepada anggota
- (3) Koordinasi dengan komunikasi, dan
- (4) Menetapkan pengarah dan tujuan.

Menurut Ekowati (2024, hal. 145) menampilkan bahwa struktur organisasi yang dirancang dengan baik aspek fungsi organizing memberikan kontribusi terhadap kesiapan aparat dalam menghadapi perubahan layanan publik. Fungsi organizing juga berkontribusi pada efisiensi operasional: struktur yang tepat mempersingkat alur pengambilan keputusan dan mempercepat pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam organisasi yang menangani pengelolaan sampah, fungsi organizing membantu memastikan bahwa unit pengangkutan, unit pemilahan, dan unit pengolahan memiliki peran, mekanisme koordinasi, dan sumber daya yang tepat agar sistem berjalan terintegrasi.

2.2.4. Tujuan Organizing

Tujuan utama dari fungsi organizing adalah menciptakan kondisi internal organisasi dimana aktivitas kerja dapat berjalan secara tertata, efisien, dan terkoordinasi sehingga organisasi mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Cedergren (2024, hal 145) bahwa organisasi publik yang menerapkan struktur kerja yang jelas dan pembagian tugas yang tepat menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan efisiensi pelayanan.

Menurut Said (2024, hal. 537) menunjukkan bahwa integrasi unit kerja melalui mekanisme organizing yang baik memfasilitasi respons cepat terhadap perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat. Tujuan lainnya adalah memperkuat adaptabilitas organisasi terhadap dinamika tugas dan lingkungan eksternal.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, fungsi organizing memungkinkan instansi publik seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk

melaksanakan pengelolaan sampah secara lebih terarah, mengikuti prosedur yang tertib, dan dapat diukur kinerjanya. Struktur organisasi yang tertata memungkinkan alur kerja mulai berjalan sinergis, sehingga target lingkungan yang bersih dan sehat dapat lebih cepat tercapai.

Secara lebih luas, organisasi yang struktur internalnya konsisten dengan tujuan strategis tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan program Kampung Iklim.

Dengan demikian, tujuan organizing dirumuskan sebagai upaya sistematis untuk membangun struktur, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang dapat mendukung efektivitas Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

2.2.5. Ciri-Ciri Organizing

Ciri-ciri organisasi yang memiliki fungsi organizing yang baik antara lain: struktur organisasi yang jelas dan sederhana, unit kerja terbagi berdasarkan fungsi operasional, jalur wewenang dan tanggung jawab tercermin dengan jelas, sistem koordinasi yang berjalan secara rutin dan efektif, serta kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan operasional.

Danko (2023, hal. 95) mengemukakan bahwa organisasi yang bertransisi ke bentuk yang lebih mandiri menunjukkan ciri-ciri: desentralisasi wewenang, komunikasi horizontal yang lebih tinggi, dan struktur yang tidak terlalu birokratis.

Ciri lainnya yang relevan ialah transparansi tugas dan alur kerja sebuah studi mengenai efektifitas kerja organisasi publik menyebut bahwa ketika koordinasi internal meningkat, tingkat efektivitas juga meningkat.

Dengan mengenali ciri-ciri tersebut, peneliti dapat menilai tingkat kualitas fungsi organizing dalam instansi publik yang menjadi objek penelitian.

2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizing

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi organizing dalam organisasi publik mencakup kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi, mekanisme koordinasi, teknologi, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal seperti regulasi serta partisipasi masyarakat.

Wibowo (2021, hal. 81-83) mengemukakan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam keberhasilan fungsi manajerial, karena kompetensi dan motivasi pegawai menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dalam setiap unit kerja.

Menurut Sari dan Nugroho (2022, hal. 155-168) bahwa struktur organisasi yang terlalu hierarkis dapat menghambat proses koordinasi antarbidang, sementara struktur yang lebih datar (flat structure) mendorong efisiensi dan kolaborasi antarpegawai. Efektivitas organisasi publik di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana koordinasi lintas unit dan komunikasi internal dijalankan secara rutin dan terarah.

Menurut Putra dan Rahmawati (2023, hal. 201-215) bahwa faktor teknologi informasi dan sistem digital menjadi katalis utama dalam penguatan fungsi organizing, karena teknologi memungkinkan arus informasi yang cepat dan transparan. Faktor eksternal seperti regulasi dan dukungan kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh besar. regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam

implementasi kebijakan lingkungan dapat memperkuat efektivitas fungsi organisasi publik, khususnya dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota.

Dengan demikian, efektivitas organizing sangat bergantung pada integrasi antara faktor internal (SDM, struktur, budaya) dan eksternal (regulasi, teknologi, partisipasi masyarakat) yang saling melengkapi dan memperkuat fungsi organisasi secara menyeluruh.

2.3. Hubungan Organizing Dengan Program Kampung Iklim (ProKlim)

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berbasis partisipasi masyarakat yang menuntut kolaborasi terpadu antara pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lokal dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurut Putri dan Hadi (2022, hal. 44-59) Keberhasilan ProKlim tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi manajerial internal, khususnya organizing, dalam mengatur sumber daya dan alur koordinasi program. Dalam konteks administrasi publik, keberhasilan program berbasis lingkungan berkorelasi kuat dengan model pengorganisasian yang mampu menciptakan integrasi peran dan tata kelola kolaboratif.

Purwanto dan Hidayat (2022, hal. 182-195) mengemukakan organizing dalam implementasi ProKlim mencakup pembagian peran antar pelaksana, pengaturan struktur kerja, serta penetapan mekanisme koordinasi lintas aktor mulai dari pemerintah daerah, desa, kelompok ProKlim, hingga kader lingkungan. Tanpa pengaturan organisasi yang jelas, program rentan mengalami tumpang tindih peran

dan lemahnya efektivitas eksekusi. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi struktural yang kuat antara lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program lingkungan berbasis komunitas.

Dalam ProKlim, organizing juga berfungsi untuk membangun pola komunikasi kerja serta pengendalian operasional kegiatan seperti pengelolaan bank sampah, kampanye lingkungan, pelaporan kegiatan, dan pemantauan indikator program. Mekanisme organisasi yang sistematis mampu memperkuat komunikasi lintas pelaksana sehingga proses pengambilan keputusan, evaluasi, dan monitoring berjalan lebih responsif. Dengan demikian, efektivitas ProKlim tidak hanya ditentukan oleh intensitas kegiatan, tetapi juga oleh struktur pengorganisasian yang mampu menggerakkan partisipasi publik secara terkoordinasi.

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, organizing menjadi faktor penentu dalam membangun konektivitas antara sistem birokrasi dan gerakan lingkungan berbasis masyarakat. Efektivitas ProKlim akan meningkat apabila pengaturan peran, pembagian tugas, dan sistem kolaborasi kelembagaan berjalan sinkron dan terintegrasi. Oleh karena itu, hubungan antara organizing dan ProKlim dapat dipahami sebagai kekuatan internal organisasi dalam membangun koordinasi, kolaborasi, serta keberlanjutan tata kelola lingkungan berbasis komunitas.

2.4. Program Kampung Iklim (ProKlim)

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan inisiatif nasional yang menekankan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan,

konservasi air, serta pengelolaan energi terbarukan. Pelaksanaan ProKlim membutuhkan dukungan organisasi yang kuat karena melibatkan berbagai aktor pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang harus bekerja secara terkoordinasi. Dalam konteks ini, fungsi organizing menjadi fondasi penting yang mengatur struktur, pembagian peran, serta mekanisme kerja antarpihak agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut KLHK (2024) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keberhasilan ProKlim di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu membentuk struktur organisasi yang responsif dan kolaboratif. Melalui fungsi organizing, Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan adanya kejelasan peran antara unit pelaksana teknis, perangkat desa, serta komunitas penggerak lingkungan dalam melaksanakan kegiatan ProKlim seperti pengelolaan sampah terpadu, bank sampah, dan pemanfaatan kembali bahan organik. Tanpa struktur dan koordinasi yang jelas, pelaksanaan program cenderung tidak konsisten dan sulit mencapai indikator keberhasilan.

Efektivitas ProKlim sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi pemerintah dalam melakukan pembagian tugas, koordinasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Dengan kata lain, fungsi organizing berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan kebijakan nasional dengan aksi kolektif masyarakat di lapangan. Ketika fungsi organizing berjalan optimal, sinergi antara birokrasi dan komunitas dapat terwujud.

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, fungsi organizing berperan penting dalam mengintegrasikan ProKlim ke dalam sistem

kerja kelembagaan yang sudah ada. Pengorganisasian yang baik memungkinkan setiap bidang, seperti persampahan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, bekerja secara sinkron menuju tujuan bersama yaitu penguatan ketahanan lingkungan berbasis komunitas. Selain itu, melalui pengaturan struktur dan koordinasi yang jelas, ProKlim dapat menjadi wadah efektif bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pemanfaatan kembali sehingga mendukung terciptanya lingkungan bersih dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian, keterkaitan antara Program Kampung Iklim (ProKlim) dan fungsi organizing menunjukkan hubungan yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Fungsi organizing berperan sebagai fondasi dalam membangun struktur kelembagaan yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan ProKlim dapat berjalan secara sistematis dan efektif. Di sisi lain, keberadaan ProKlim mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola organisasi, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan.

Interaksi yang sinergis antara aspek pengorganisasian dan implementasi program tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja internal lembaga, tetapi juga memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan

partisipatif, pelaksanaan ProKlim menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim merupakan langkah strategis untuk memastikan program lingkungan dapat diimplementasikan secara optimal. Sinergi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan lingkungan daerah serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo secara lebih komprehensif dan berkesinambungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Furqany (2019, hal. 256) penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial secara kontekstual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menekankan pemaparan fenomena secara sistematis dan rinci dalam konteks alami, dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual, proses, dan mekanisme yang terjadi tanpa mengubah atau memanipulasi variabel penelitian.

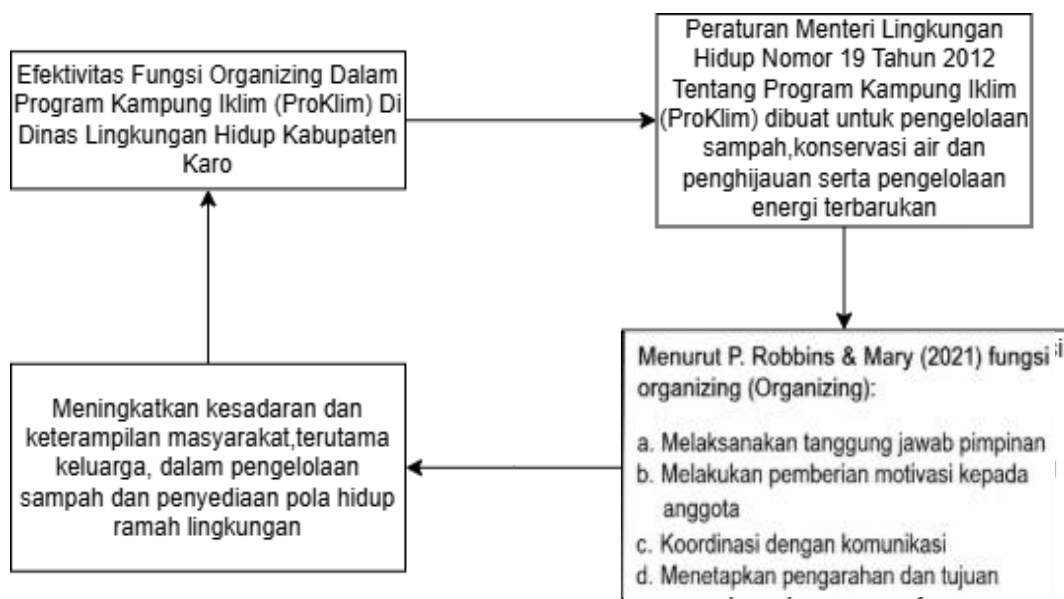
Menurut Mardatillah dan Murhayati (2023, hal. 110-125) pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena manusia atau sosial dengan menekankan pengalaman, persepsi, dan interaksi antarindividu dalam setting alami.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menelaah efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci struktur organisasi, pembagian tugas, koordinasi antar-unit, serta interaksi antara dinas dan masyarakat. Melalui wawancara mendalam dengan pegawai dinas, dan komunitas penggerak

lingkungan, penelitian ini menghasilkan data yang komprehensif mengenai pelaksanaan ProKlim.

3.2. Kerangka Konsep

Tabel 3.1 Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

1. Efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan.
2. Fungsi organizing atau pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan menyusun, mengatur, dan menata sumber daya baik manusia, sarana, maupun kegiatan agar tujuan organisasi atau program dapat tercapai secara efisien dan efektif.
3. Pengelolaan lingkungan secara partisipatif adalah pendekatan pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat atau

pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program lingkungan. Tujuan pendekatan ini adalah memastikan keputusan dan tindakan terkait lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan peran aktif masyarakat setempat.

4. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan mendorong masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara lokal melalui pengelolaan sampah, konservasi air dan penghijauan serta pengelolaan energi terbarukan. Program ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan lingkungan sehingga tercipta desa atau kampung yang ramah iklim.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga bagaimana isi dikategorikan dan apa kategorisasi penelitiannya.

Kategorisasi yang ditentukan didasarkan pada beberapa indikator yang telah diidentifikasi tentukan terlebih dahulu. Kategorisasi pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya tanggung jawab pimpinan

Dimana adanya peran pemimpin dalam sebuah tanggung jawab terhadap suatu organisasinya agar memberikan dampak baik kepada anggotanya

- b. Adanya pemberian motivasi kepada anggota

Terdapat pemberian motivasi dalam suatu program agar dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi terhadap anggotanya

c. Adanya komunikasi

Seorang pemimpin memberikan komunikasi secara berkala kepada bawahannya agar terciptanya hubungan kerja yang baik

d. Adanya pengarahan dan tujuan

mengetahui bagaimana cara mengerjakan suatu program dan tujuannya

3.5. Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang memberikan informasi atau pengetahuan mengenai program kampung iklim (ProKlim). Mereka biasanya memiliki keahlian atau pengalaman materi pelajaran yang relevan dan dapat membantu orang lain lebih memahami subjek tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nama : Andika Wiranata Pinem, ST
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Jabatan : Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
2. Nama : Risa Bella Harahap, Amd
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Pelaksana
3. Nama : Yessi Sembiring Brahmana, S.Si, M.Si
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Pengawas Lingkungan/ Kasi. Kerusakan Lingkungan
4. Nama : Rutina Br. Sembiring, S.Sos , MIP
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting. Untuk memperoleh Keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.

a. Observasi

Menurut Putri dan Murhayati (2025, hal. 74) Observasi membantu peneliti menangkap dinamika yang tidak selalu terlihat melalui wawancara. Observasi dilakukan di lapangan, termasuk kegiatan ProKlim yang melibatkan masyarakat, koordinasi antarpegawai DLH, dan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung efektivitas organisasi dan struktur pengelolaan ProKlim, termasuk interaksi antarpetugas, partisipasi masyarakat, serta cara sumber daya dikelola.

b. Wawancara

Menurut Rachmawati (2022, hal. 1-10) Pendekatan semi-terstruktur memungkinkan alur wawancara fleksibel, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi informasi yang mungkin tidak muncul dalam pertanyaan tertulis wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam ProKlim, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang, dan fasilitator program di tingkat kecamatan/desa. Teknik ini memberi kesempatan kepada

narasumber untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan ide mereka mengenai bagaimana fungsi organizing dijalankan, bagaimana koordinasi antarunit dilakukan, dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ProKlim.

2. Data Sekunder

Menurut Ardiansyah dkk (2023, hal. 1-9) Melalui dokumentasi, peneliti dapat menilai keselarasan antara rencana program, pelaksanaan fungsi organizing, dan hasil yang dicapai, serta meninjau perkembangan program dari waktu ke waktu. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari laporan ProKlim, notulen rapat, arsip kegiatan DLH, serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Karo.

Penggunaan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas fungsi organizing dalam mendukung pengelolaan lingkungan secara partisipatif melalui ProKlim. Dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari narasumber dan data sekunder dari dokumen resmi, peneliti dapat memastikan informasi yang diperoleh valid dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan menata informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat diinterpretasikan dengan jelas. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan ke

dalam kategori, menelaah unit informasi, merumuskan pola, menyoroti hal penting, dan menyusun kesimpulan yang mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, untuk menilai efektivitas fungsi organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

Menurut Rachmawati (2022, hal 1-10) peneliti melakukan beberapa tahapan analisis:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga fokus hanya pada informasi yang relevan dengan koordinasi antarunit, pembagian tugas, dan partisipasi masyarakat dalam ProKlim.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi deskriptif agar pola dan hubungan antar tema mudah dikenali.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan, sekaligus memverifikasi temuan melalui cross-check dengan narasumber dan dokumen resmi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data.

Melalui langkah-langkah ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai peran fungsi organizing dalam mendukung pelaksanaan ProKlim dan pengelolaan lingkungan secara partisipatif di Kabupaten Karo.

3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe Desa Ketaren, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152, serta beberapa desa dan kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Pemilihan lokasi ini dilakukan karena wilayah tersebut merupakan tempat implementasi langsung ProKlim, sehingga peneliti dapat mengamati efektivitas fungsi organizing, koordinasi antarunit, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Waktu Penelitian ini dimulai dari November 2025 sampai bulan februari 2026.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam Program Kampung Iklim (ProKlim)

Visi

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang peduli lingkungan, tangguh terhadap perubahan iklim, serta berpartisipasi aktif dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan”

Misi

1) Lingkungan Berkelanjutan

Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui penerapan praktik ramah lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak di tingkat masyarakat.

2) Masyarakat Peduli Iklim

Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan Program Kampung Iklim.

3) Penguatan Kelembagaan

Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pelaksana Program Kampung Iklim melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarbidang, serta kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.

4) Adaptasi Perubahan Iklim

Mendorong pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, seperti pengelolaan air, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana berbasis potensi dan kearifan lokal masyarakat.

5) Mitigasi Perubahan Iklim

sampah, peningkatan ruang terbuka hijau, penggunaan energi ramah lingkungan, serta pengurangan pencemaran lingkungan.

6) Tata Kelola yang Efektif

Mewujudkan pelaksanaan Program Kampung Iklim yang efektif dan efisien melalui penerapan fungsi organizing yang optimal, termasuk kejelasan struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

3.9.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo



Sumber : google.wikipedia.

Gambar 3.1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karo merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam membantu Pemerintah Kabupaten Karo menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan persampahan. Pembentukan DLH Kabupaten Karo didasarkan pada **Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 8 Tahun 2016** tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara fungsional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo memiliki peran dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program, serta kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan

pemerintah daerah. Selain itu, DLH juga bertugas menyusun laporan pelaksanaan program sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, DLH Kabupaten Karo berperan aktif dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu perubahan iklim, serta pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk mendukung efektivitas program, DLH Kabupaten Karo juga melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar kebijakan dan kegiatan lingkungan hidup dapat terlaksana secara terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Karo.

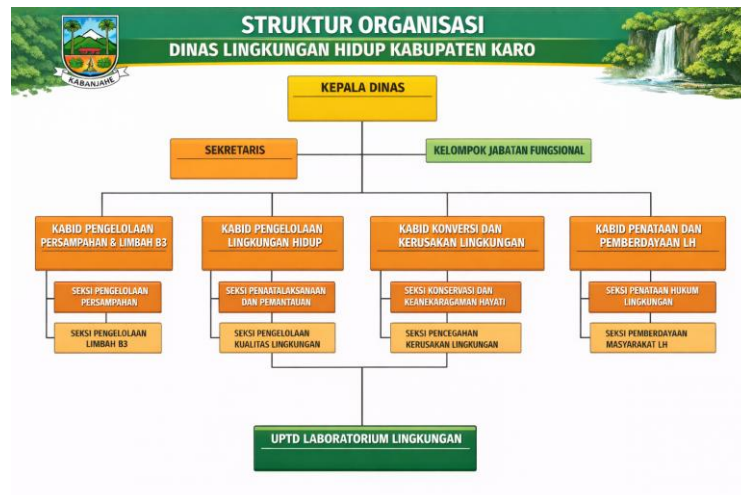
Lokasi Kantor

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo berlokasi di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 22152. Lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan daerah sehingga mudah dijangkau dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan koordinasi.

Letak Geografis Kabupaten Karo

Secara geografis, Kabupaten Karo terletak pada kisaran 3°06'19" Lintang Utara dan 98°15'54" Bujur Timur. Wilayah ini berada di bagian tengah Provinsi Sumatera Utara dan dikenal sebagai daerah dataran tinggi yang memiliki kondisi iklim relatif sejuk. Karakteristik geografis tersebut turut memengaruhi kondisi lingkungan serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karo.

3.9.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo



Gambar 3.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan.

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, yang meliputi pembagian tugas, penetapan peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antarbidang dan pihak terkait di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana fungsi organizing diterapkan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan ProKlim di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses wawancara, narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim. Untuk memudahkan proses analisis, data narasumber

dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jabatan, peran dalam program, serta keterlibatan dalam kegiatan ProKlim.

Karakteristik narasumber dan jawaban yang diberikan digunakan sebagai sumber utama informasi dalam penelitian ini. Selanjutnya, data hasil penelitian disajikan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian guna memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin disusun untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga informasi yang dihimpun dapat disajikan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian **“Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo”** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	1	25%
2	Perempuan	3	75%
	Jumlah	4	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 75%. Sementara itu, narasumber berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 25%. Komposisi narasumber tersebut mencerminkan keterlibatan pegawai perempuan yang lebih dominan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur disusun untuk mengetahui karakteristik usia narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Pengelompokan umur bertujuan untuk mempermudah analisis data hasil wawancara, sehingga informasi yang diperoleh dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian berjudul **“Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten**

Karo”, narasumber dikelompokkan ke dalam dua kategori umur, yaitu 25–35 tahun dan 36–50 tahun. Distribusi narasumber berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	25–35 Tahun	1	25%
2	36–50 Tahun	3	75%
	Jumlah	4	100%

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber berada pada kelompok umur **36–50 tahun**, yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar **75%**. Sementara itu, narasumber yang berusia **25–35 tahun** berjumlah 1 orang dengan persentase **25%**. Dominasi narasumber pada rentang usia 36–50 tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo banyak melibatkan pegawai yang memiliki pengalaman kerja dan pemahaman yang cukup dalam pengelolaan program lingkungan hidup.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendidikan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Pengelompokan tingkat pendidikan diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas akademik narasumber sebagai sumber informasi, sehingga data hasil wawancara dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian berjudul “Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo”, narasumber dikelompokkan ke dalam dua tingkat pendidikan, yaitu Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana (S1). Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Ahli Madya (A.Md)	1	25%
2	Sarjana (S1)	3	75%
	Jumlah	4	100%

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 75%,

sedangkan narasumber dengan tingkat pendidikan Ahli Madya (A.Md) berjumlah 1 orang atau sebesar 25%. Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam memahami pelaksanaan serta pengorganisasian Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, sehingga informasi yang diberikan relevan dengan fokus penelitian.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Tanggung Jawab Pimpinan

Tanggung jawab pimpinan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan fungsi *organizing*, khususnya dalam memastikan kejelasan pembagian tugas, efektivitas koordinasi, serta keterpaduan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, tanggung jawab pimpinan telah dijalankan dalam bentuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan koordinatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pimpinan bertanggung jawab dalam membagi tugas kepada staf serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, dalam praktiknya, pembagian tugas tersebut belum sepenuhnya terstruktur antarbidang, sehingga pelaksanaan kegiatan masih cenderung berjalan secara parsial. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB,

dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md selaku pelaksana, yang menyampaikan bahwa pimpinan aktif memantau kegiatan serta memberikan arahan apabila ditemukan kendala di lapangan. Namun demikian, koordinasi antarbidang belum berjalan secara optimal sehingga beberapa kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pimpinan masih lebih dominan pada aspek pengawasan individual dibandingkan dengan penguatan sistem kerja kolektif antarbidang. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si mengungkapkan bahwa pimpinan juga memiliki tanggung jawab dalam menjalin koordinasi dengan pihak eksternal, seperti pengawas lingkungan, pemerintah desa, dan masyarakat. Akan tetapi, koordinasi lintas instansi tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum berjalan secara seimbang di seluruh wilayah binaan ProKlim. Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP menambahkan bahwa pimpinan telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program, seperti fasilitas pengelolaan sampah dan perlengkapan kebersihan. Namun, fokus penyediaan fasilitas tersebut masih lebih banyak diarahkan pada kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan kegiatan lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, serta pengendalian dampak perubahan iklim belum memperoleh dukungan yang proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dijalankan, namun belum sepenuhnya mampu memperkuat fungsi *organizing* secara optimal. Hal ini terlihat dari belum jelasnya pembagian peran antarbidang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta belum adanya sistem pemantauan terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan ProKlim secara menyeluruh.

b. Adanya Pemberian Motivasi kepada Anggota

Motivasi merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan fungsi *organizing*, karena berpengaruh langsung terhadap semangat kerja, kedisiplinan, serta tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan program. Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, pemberian motivasi menjadi bagian dari upaya pimpinan untuk mendorong keterlibatan aktif staf dan pihak terkait dalam mencapai tujuan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST menyampaikan bahwa pimpinan memberikan dorongan kerja dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan serta menyampaikan arahan kepada staf, sehingga meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pelaksana. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md menjelaskan bahwa motivasi juga diberikan melalui pendekatan persuasif, seperti penguatan kerja tim

dan pemberian apresiasi atas capaian kegiatan, yang berdampak positif terhadap semangat kerja anggota. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring Brahma, S.Si., M.Si menambahkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan bertujuan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keberhasilan program merupakan tanggung jawab seluruh pelaksana. Selain internal organisasi, Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP menyatakan bahwa motivasi juga diarahkan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemberian motivasi masih lebih banyak bersifat personal dan situasional, serta belum sepenuhnya didukung oleh sistem motivasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini berimplikasi pada belum meratanya semangat dan partisipasi anggota dalam seluruh kegiatan ProKlim. Dengan demikian, meskipun upaya pemberian motivasi telah dilakukan oleh pimpinan, penguatan mekanisme motivasi yang lebih sistematis masih diperlukan untuk mendukung efektivitas fungsi *organizing* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian motivasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat. Motivasi diberikan melalui kehadiran

pimpinan di lapangan, arahan langsung, pendekatan persuasif, serta pembinaan berkelanjutan. Upaya tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kerja pelaksana program. Namun demikian, efektivitas motivasi masih sangat bergantung pada kesinambungan pembinaan dan konsistensi keterlibatan seluruh pihak, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat agar pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara berkelanjutan.

c. Adanya Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen kunci dalam fungsi *organizing* karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan kebijakan, arahan kerja, serta membangun koordinasi antaranggota organisasi. Dalam konteks administrasi publik, komunikasi yang efektif berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam oleh seluruh pelaksana. Oleh karena itu, kualitas komunikasi sangat menentukan tingkat keterpaduan kerja dan keberhasilan pelaksanaan suatu program, termasuk Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

Berdasarkan Pembicaraan dengan para informan, diperoleh gambaran bahwa komunikasi antara pimpinan dan pelaksana Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 11.00 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST dan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md menjelaskan bahwa komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan melalui pertemuan

langsung, rapat kerja, serta pemanfaatan media komunikasi daring seperti grup WhatsApp.. Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring Brahma, S.Si., M.Si menjelaskan bahwa pola komunikasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilakukan secara informal, sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan anggota dapat terjalin secara lebih terbuka dan tidak kaku. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP yang menyatakan bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik antara pimpinan dan bawahan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif serta mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin belum sepenuhnya didukung oleh sistem komunikasi organisasi yang terstruktur dan terintegrasi. Komunikasi masih lebih bersifat informatif dan reaktif terhadap kondisi di lapangan, serta belum secara konsisten menjangkau seluruh bidang dan pihak terkait. Akibatnya, koordinasi lintas bidang dan lintas instansi belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan ProKlim masih berlangsung secara parsial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran kegiatan. Namun, komunikasi tersebut belum sepenuhnya mampu memperkuat fungsi *organizing* secara menyeluruh. Diperlukan penguatan mekanisme komunikasi yang

lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan agar seluruh pelaksana dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama serta dapat bekerja secara sinergis dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

d. Adanya Pengarahan dan Tujuan

Pengarahan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan fungsi *organizing*, karena berperan dalam mengarahkan aktivitas anggota agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim), pengarahan menjadi sarana bagi pimpinan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian tujuan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST menjelaskan bahwa pimpinan memberikan pengarahan melalui pembagian tugas yang jelas serta penetapan target dan capaian kegiatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana, disertai dengan arahan lanjutan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md yang menyampaikan bahwa pengarahan umumnya dilakukan pada tahap awal kegiatan agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terkoordinasi dan terhindar dari tumpang tindih tugas. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB

dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si menambahkan bahwa pengarahannya tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga bertujuan untuk menegaskan sasaran utama Program Kampung Iklim, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan serta pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP mengungkapkan bahwa pengarahannya yang dilakukan secara konsisten mampu membantu anggota bekerja dengan lebih terarah dan bertanggung jawab, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mengikuti kegiatan ProKlim.

Dalam menghadapi kendala tersebut, pimpinan dan pelaksana program melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengarahannya dan pencapaian tujuan program. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pengarahannya secara berulang dan lebih persuasif kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Selain itu, pelaksana program juga berupaya melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pengarahannya, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan bentuk kegiatan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian upaya yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengarahan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian tujuan program. Pengarahan tersebut membantu anggota memahami peran dan tanggung jawabnya serta menjaga keterarahan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, efektivitas pengarahan masih menghadapi kendala, terutama terkait rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengarahan yang tidak hanya bersifat internal, tetapi juga lebih menyentuh aspek pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, agar tujuan Program Kampung Iklim dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Hasil Wawancara

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Efektivitas Fungsi Organizing Dalam Program Kampung Iklim (Proklim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, penulis melakukan analisis terhadap data hasil wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

Berdasarkan keseluruhan data penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis mengenai fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim. Analisis ini difokuskan pada bagaimana

pimpinan mengatur pembagian tugas, membangun koordinasi antarbidang, serta mengarahkan sumber daya manusia agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

Dalam melakukan analisis tersebut, data hasil wawancara dikaji dan disesuaikan dengan data sekunder, berupa teori-teori yang berkaitan dengan fungsi organizing, kepemimpinan, dan efektivitas organisasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam mengorganisasikan Program Kampung Iklim serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

a. Adanya Tanggung Jawab Pimpinan

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas fungsi *organizing* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, penulis melakukan analisis terhadap data hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan. Analisis ini difokuskan pada tanggung jawab pimpinan dalam mengatur pembagian kerja, membangun koordinasi, serta mengintegrasikan seluruh kegiatan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab pimpinan telah dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja, pemberian arahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pimpinan berperan sebagai pengendali utama dalam menggerakkan sumber daya manusia agar kegiatan ProKlim tetap berjalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Handayani (2018, hal. 4) yang menyatakan bahwa koordinasi

merupakan proses penyatuan kegiatan dari unit-unit organisasi agar tercipta keselarasan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian tugas antarbidang dalam pelaksanaan ProKlim belum sepenuhnya terstruktur dan sistematis. Kegiatan masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi *organizing* belum optimal, karena pengorganisasian yang efektif menuntut adanya kejelasan pembagian tugas, hubungan kerja, serta tanggung jawab yang terkoordinasi dengan baik antarunit organisasi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas instansi juga belum dilakukan secara berkelanjutan. Padahal, pelaksanaan program lingkungan seperti ProKlim membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Robbins dan Judge (2020, hal. 55) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam membangun kerja sama lintas struktur guna memastikan seluruh program berjalan secara terpadu. Lemahnya koordinasi tersebut berdampak pada belum meratanya pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah binaan ProKlim.

Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, pimpinan telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan fasilitas pendukung, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Namun, dukungan tersebut masih lebih terfokus pada satu aspek kegiatan, sementara aspek lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, dan pengendalian dampak

perubahan iklim belum memperoleh perhatian yang seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian sumber daya belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan ProKlim yang bersifat komprehensif, fungsi organizing harus mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dijalankan, namun belum sepenuhnya mampu memperkuat fungsi *organizing* secara optimal. Kelemahan masih terlihat pada kejelasan pembagian peran antarbidang, koordinasi lintas instansi, serta belum adanya sistem kerja terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan ProKlim secara berkelanjutan.

b. Adanya Pemberian Motivasi kepada Anggota

Motivasi memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi *organizing* karena berkaitan langsung dengan semangat kerja, kedisiplinan, dan keterlibatan anggota dalam menjalankan program. Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, pemberian motivasi menjadi salah satu strategi pimpinan untuk mendorong partisipasi aktif aparatur serta masyarakat dalam mencapai tujuan program.

Berdasarkan hasil analisis, motivasi diberikan melalui berbagai cara, antara lain kehadiran pimpinan di lapangan, penyampaian arahan secara langsung, penguatan kerja sama tim, serta pemberian penghargaan atas hasil kerja yang dicapai. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan

semangat kerja pelaksana dalam melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pandangan Inu Kencana Syafie (2019, hal. 23) yang menyatakan bahwa motivasi dalam administrasi publik berfungsi sebagai dorongan bagi aparatur agar bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan organisasi.

Selain ditujukan kepada internal organisasi, motivasi juga diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Upaya ini bertujuan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki masyarakat terhadap Program Kampung Iklim, sehingga mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian motivasi masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem motivasi yang terencana dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya tingkat partisipasi dan semangat kerja dalam seluruh kegiatan ProKlim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme motivasi yang lebih konsisten agar fungsi *organizing* dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian motivasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan pengaruh positif terhadap semangat kerja pelaksana. Namun, untuk meningkatkan efektivitas fungsi *organizing*, motivasi perlu dikelola secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan mekanisme kerja organisasi.

c. Adanya Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Melalui komunikasi yang berjalan, pimpinan dan pelaksana dapat menyampaikan informasi terkait kebijakan, pembagian tugas, serta perkembangan kegiatan di lapangan. Hal ini membantu kelancaran pelaksanaan program dan meminimalkan terjadinya hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Komunikasi yang terjalin juga memberikan ruang bagi pimpinan dan anggota untuk saling bertukar informasi dan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan adanya komunikasi tersebut, pelaksanaan kegiatan ProKlim dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, sehingga program tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, komunikasi yang berlangsung belum sepenuhnya difungsikan sebagai alat strategis dalam penguatan fungsi *organizing*. Informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum secara sistematis diarahkan untuk membangun koordinasi lintas bidang secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antar pelaksana terkait prioritas kegiatan, alur kerja, dan keterkaitan antarprogram dalam ProKlim.

Meskipun demikian, komunikasi yang berlangsung masih dapat terus ditingkatkan agar lebih terkoordinasi dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat. Penguatan komunikasi secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu

menyamakan pemahaman, memperlancar koordinasi antarbidang, serta mendukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim.

Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung fungsi *organizing*. Melalui pengelolaan komunikasi yang semakin baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sinergis.

d. Adanya Pengarahan dan Tujuan

Pengarahan dan penetapan tujuan merupakan unsur penting dalam fungsi *organizing*, karena menjadi dasar dalam mengarahkan pelaksana agar bekerja sesuai dengan rencana serta tujuan program yang telah ditetapkan. Pengarahan yang jelas membantu menciptakan keselarasan tindakan antaranggota dan memastikan kegiatan berjalan secara terkoordinasi.

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, pengarahan dan tujuan program diwujudkan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Kejelasan pembagian tugas yang dimana pengarahan diberikan untuk memastikan setiap pelaksana memahami tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan ProKlim.
- b) Penumbuhan semangat kerja dan kerja sama yang dimana Pengarahan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga bertujuan menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan antaranggota

- c) Pengarahan juga digunakan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal.

Selain kendala internal, pelaksanaan Program Kampung Iklim juga menghadapi tantangan dari sisi partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih menunjukkan tingkat antusiasme yang rendah terhadap kegiatan program. Menanggapi kondisi tersebut, pengarahan diarahkan pada upaya peningkatan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pemberian pemahaman mengenai manfaat langsung Program Kampung Iklim bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam mendukung keberhasilan ProKlim.

Secara keseluruhan, pengarahan dan penetapan tujuan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan arah kerja yang cukup jelas bagi pelaksana program. Pengarahan tersebut membantu mengoordinasikan kegiatan, menjaga semangat kerja, serta menjadi sarana penyelesaian kendala, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Konsistensi pengarahan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat keterpaduan pelaksanaan program dan mendukung pencapaian tujuan ProKlim secara optimal.

e. Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

berbasis masyarakat. Sejak awal pelaksanaannya, ProKlim diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Secara umum, tingkat keberhasilan program menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian.

Tujuan utama Program Kampung Iklim adalah mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program ini juga bertujuan untuk membangun perilaku ramah lingkungan, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, serta menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan tertata. Dengan tujuan tersebut, ProKlim diharapkan mampu menjadi sarana kolaborasi antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan Program Kampung Iklim telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan yang paling menonjol adalah pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pembersihan lingkungan, pengangkutan sampah secara rutin, serta pembiasaan hidup bersih di lingkungan permukiman. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan juga telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan lain seperti penghijauan dan pemeliharaan lingkungan juga mulai dilaksanakan, meskipun belum merata di seluruh wilayah binaan ProKlim.



Gambar 4.1 Kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim

Rangkaian pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menyusun rencana kegiatan dan memberikan arahan kepada pelaksana program di lapangan. Selanjutnya, pelaksana program bekerja sama dengan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program ke depannya.

Meskipun Program Kampung Iklim telah berjalan dan memberikan dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu

hambatan utama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat masih kurang antusias terhadap program karena keterbatasan pemahaman, kesibukan sehari-hari, serta anggapan bahwa program lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi sarana pendukung maupun koordinasi antarbidang, juga menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan sejak tahun 2020 dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, khususnya dalam pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun, untuk mencapai tujuan program secara lebih optimal, diperlukan penguatan pengorganisasian, peningkatan koordinasi, serta pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat agar keterlibatan dan keberlanjutan program dapat terus ditingkatkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas fungsi *organizing* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat. Sejak mulai dijalankan pada tahun 2020, ProKlim telah memberikan kontribusi positif, khususnya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *organizing* dalam pelaksanaan ProKlim telah diterapkan melalui adanya pembagian tugas, komunikasi, pengarahan, serta pemberian motivasi kepada pelaksana program. Pimpinan berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan arahan kerja, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Upaya tersebut membantu menjaga keberlangsungan program dan memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, efektivitas fungsi *organizing* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum terintegrasinya pembagian peran antarbidang secara menyeluruh, koordinasi lintas instansi yang belum berjalan secara berkelanjutan, serta pelaksanaan kegiatan ProKlim yang masih terfokus pada aspek tertentu, terutama pengelolaan sampah.

Sementara itu, kegiatan lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, dan pengendalian dampak perubahan iklim belum terlaksana secara merata.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Kampung Iklim masih beragam. Sebagian masyarakat telah menunjukkan keterlibatan yang cukup baik, namun masih terdapat masyarakat yang kurang antusias terhadap program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim tidak hanya ditentukan oleh pengorganisasian internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan dan memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, namun masih memerlukan penguatan fungsi *organizing* agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo diharapkan dapat memperkuat fungsi *organizing* melalui pembagian tugas yang lebih jelas dan terintegrasi antarbidang. Penguatan koordinasi internal dan lintas instansi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan ProKlim dapat berjalan secara terpadu dan seimbang sesuai dengan tujuan program.

2. Pimpinan dan pelaksana program diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pengarahannya, komunikasi, serta pemberian motivasi kepada seluruh pelaksana. Selain itu, diperlukan perencanaan program yang lebih menyeluruh agar kegiatan ProKlim tidak hanya terfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lainnya secara merata.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan agar program tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan hidup di wilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Ariani, F. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 33–45.
- Bowo, F. A., & Mahrudi, I. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Dasar. *Jurnal Perspektif*, 21(2), 106–110.
- Cedergren, A. (2024). Building organizational adaptive capacity in the face of crisis. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 145–162.
- Danko, J., & Kučera, M. (2023). Changes in formal structure towards self-managing organization: Lessons from European public institutions. *Administrative Sciences*, 13(4), 95–112.
- Ekowati, R. (2024). TY - JOUR AU - Cedergren, A. PY - 2024 TI - Building organizational adaptive capacity in the face of crisis JO - Journal of Public Administration Research and Theory VL - 34 IS - 2 SP - 145 EP - 162 DO - 10.1016/j.jopart.2024.03.005 ER - TY - JOUR AU - St. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 11(2), 145–160.
- Febrian, R., & Maharani, S. (2021). Analisis Dimensi Efektivitas dalam Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Indonesia*.
- Furqany, S. (2019). Strategi Komunikasi Dakwah Melalui Bantuan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (Act) Aceh Dalam Menarik Minat Donasi (Studi Pada Kasus Konflik Rohingya). *Jurnal Al-Bayan*, 24(2), 256–270.
- Handyaningrat, S. (2018). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Cetakan ke-16. Jakarta: Gunung Agung.
- Kurniawan, A., & Rahayu, S. (2022). Pembagian Tugas dan Efektivitas Struktur Organisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(3), 211–224.

- (KLHK), K. L. H. dan K. (2024). *Panduan Nasional Program Kampung Iklim (ProKlim)TY - JOUR AU - Puspitasari, N. AU - Rahmadani, A. TI - Efektivitas Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam Penguatan Kapasitas Komunitas: Perspektif Kebijakan Lokal JO - Jurnal Kebijakan Lingkungan dan Iklim N. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.*
- Lestari, A. S. (2020). *Komunikasi Organisasi*. Pustaka Karya Mandiri.
- Mardatillah, M., & Murhayati, Y. (2023). Pendekatan Deskriptif Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 110–125.
- Nuraida. (2019). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Negara. *Jurnal Publik*, 16(1), 1–10.
- Purwanto, A. J., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Manajemen Lingkungan Indonesia*, 9(3), 182–195.
- Putra, A., & Rahmawati, D. (2023). Transformasi Digital dalam Penguatan Fungsi Organizing di Instansi Pemerintah. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 7(3),
- Putri, A., & Hadi, S. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Program Lingkungan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Administrasi Lingkungan Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 44–59.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif: observasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13074–13086.
- Rachmawati, I. N. (2022). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Lembar Metodologi*, 1(1), 1–10.
- Rainey, H. G. (2015). *Understanding and Managing Public Organizations* (5th ed.). Jossey-Bass. 5(1) 309
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Organizational Behavior* (18 (ed.)). Pearson.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational Behavior* (18th Edition). New York: Pearson Education Limited.

- Said, M. M. (2024). The synergy of public information dissemination: insights from East Java province. *Public Policy and Administration*, 23(4), 537–551.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. B. (2022). Pengaruh Struktur Organisasi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen Publik*, 9(2), 155–168.
- Suciasih, Asjulia, & Syafar. (2024). Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Daerah: Tantangan Koordinasi dan Kapasitas Organisasi. *Jurnal Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Sudrajat, D., Mustiraya, E., & Framesthi, L. (2025). Strengthening Coordination in Local Government Structures: A Pathway to Service Quality. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 33–48.
- Syafiie, Inu Kencana. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi Revisi. Cetakan ke-10. Bandung: PT Refika Aditama.

LAMPIRAN

Draft Wawancara Skripsi

Nama : Reza Pramana
 Npm : 2203100064
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Acc Pemb
 19/02/2026
 SYAFRUDDIN, MH

JUDUL : EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

i. Pemberian Materi Penyuluhan Tentang Program

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan tentang Program Kampung Iklim kepada masyarakat dan pelaksana program?
2. Apakah pertemuan atau rapat yang dilakukan sudah membantu memperjelas tugas masing-masing pihak dalam ProKlim?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran penyuluhan dan pertemuan yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di lapangan?

ii. Komunikasi Pimpinan kepada Bawahan

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara pimpinan menyampaikan arahan atau instruksi kepada staf terkait pelaksanaan ProKlim?
2. Apakah komunikasi antara pimpinan dan staf berjalan dengan baik dan mudah dipahami dalam kegiatan ProKlim?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komunikasi yang terjalin selama ini agar dapat mempengaruhi kerja sama dan kinerja tim?

iii. Pengarahan dan Pemberian Motivasi

Pertanyaan Wawancara

1. Bentuk pengarahan apa saja yang biasanya diberikan kepada staf atau pelaksana ProKlim?
2. Bagaimana upaya pimpinan dalam memberikan motivasi agar staf dan masyarakat tetap semangat menjalankan ProKlim?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengarah dan motivasi yang diberikan selama ini berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim)?

iv. Pelatihan Program Kampung Iklim (ProKlim)

Pertanyaan Wawancara

1. Pelatihan apa saja yang pernah diberikan terkait Program Kampung Iklim, seperti pengelolaan sampah atau penghijauan?
2. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatur dan melaksanakan pelatihan tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelatihan yang telah diberikan memengaruhi kemampuan pelaksana dalam menjalankan Program Kampung Iklim (ProKlim)?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fislip.umsu.ac.id fislip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 07 November 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Reza Pramana
 NPM : 2203100064
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan aks : 125 sks, IP Kumulatif 3,74

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas fungsi organizing program pengekuasaan ^{Program} sampah dalam menyusun kampung iklim (proklim) di dinas lingkungan hidup kabupaten karo	7/11/2025 Aof.
2	Peran kepemimpinan Adaptif berbasis nilai Sangkep Nggeluh dalam fungsi organizing pengelolaan kepegawaian untuk pembangunan Desa berkelanjutan di kabupaten karo	
3	Efektivitas fungsi Controlling terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan kepuasan masyarakat di DPMPSTP kabupaten karo	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 07 November 2025.

Ketua,

 (ANANDA MAHARDIKA S.Sos., Msp.)
 NIDN: 017118904

ps: Syafruddin S.Sos M.H

Pemohon,

(..... Reza Pramana)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

(Syafruddin S.Sos M.H)
 NIDN: 013005601





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar diwujudkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 2003/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : REZA PRAMANA
N P M : 2203100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah) PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO
Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 027.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Djumadil Awal 1447 H
12 November 2025 M



Assoc. Prof. Dr. AKHFIN SALEH, MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umu.ac.id> * fslp@umu.ac.id | umsumedan @ umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 19 Desember 2025

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Reza Pramana
 N P M : 2203100064
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1964.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024... tanggal 12 Desember 2025 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Fungsi Organizing Dalam Program Kampung Iklim (Prakim)
 Di dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

(Ananda Mahardika S.Sos., M.Si)

NIDN: 0122118801

Menyetujui

Pembimbing

(Syarifuddin, S.Sos., M.H.)

NIDN: 0130056601

Pemohon,

(Reza Pramana)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
UIN
UIN

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 2204/UNDIII.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat 19 Desember 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : AMANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	DIAN PERMATA	2203100023	Dr. NAILI KHARIDAH, S.P., M.Pd.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., M.SP.	STRATEGI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM GO DIGITAL DI KANTOR DINAS UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
17	REZA PRAMANA	2203100084	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Soc., MAP.	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG ILMU (PROKLU) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO
18	AZZAHRA PUAN ANDARA	2203100072	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	FUNGSI PLANNING DALAM UPAYA OPTIMALISASI KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TRITANJADI CABANG TUASAN
19	MURUL ASPIN	2003100063	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.H.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Soc., MAP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KABUPATEN GAYO LUES
20	MARTYU PRIBADI	2003100030	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Soc., MAP.	Dr. JERAN RICHHO IZAHSYAH, S.Soc., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN DAN PENJAMINAN WANITA TUNASUSILA DI KOTA MEDAN

Medan, 27 Desember 2025
17 Desember 2025 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umhsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/02/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093

<http://fkip.umhsu.ac.id>

fkip.umhsu.ac.id

umsumedan

umsumedan

umsumedan

umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : Reza Prana
 NPM : 2203100064
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi Fungsi Organisasi Dalam Program Kampung Iklim (Profil.M) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Huta

No	Tanggal	Kegiatan Advis / Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	06 Desember 2025	- Perbaiki kesalahan pada Bab I	I ✓
2.	12.12.25	- Aco Bab I	✓
3.	20.12.25	- Perbaiki kesalahan pada Bab II	II ✓
4.	30.12.25	- Mc Bab II	✓
5.	10.1.26	- Perbaiki kesalahan pada Bab III	III ✓
6.	20.1.26	- Mc Bab III	✓
7.	6.2.26	- Perbaiki kesalahan pada Bab IV & V	IV & V ✓
8.	20.2.26	- Mc Bab IV dan Bab V	✓
9.	25.2.26	lengkapi syarat kelengkapan skripsi.	✓
10.	28.2.26	Mc Pemb. skripsi siap untuk diujikan dan sedang juga ujian	✓



Asesor: Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sy, M.P. (Ananda Mahardima, S.SosyM) (Syaiful Akla S.Sos.M.H.)
 NIDN: 90017402

Ketua Program Studi

NIDN: 0022118001

Medan, 28.2.2026

Pembimbing

NIDN: 0130056601





MAJELIS FENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 149/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Medan, 26 Rajab 1447 H

Lampiran : -,-

15 Januari 2026 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, atas nama :

Nama mahasiswa	: REZA PRAMANA
N P M	: 2203100064
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 6030017402





PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN DJAMIN GINTING Gg. CIK DITIRO KABANJAHE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 660/213/PLH/2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dengan ini menerangkan bahwa :

No	NAMA	NIM
1.	REZA PRAMANA	2203100064

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dengan judul "EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO" dan selama penelitian telah menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan penelitian. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan Skripsi

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Dikeluarkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 05 Februari 2026



Nius Abd. Ginting, S.Hut., M.Si.
Pembina I/a
NIP. 19850413 201101 1 015



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 09/950/LAP/PTK/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 127139201000981 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> • perpustakaan@umsu.ac.id • [perpustakaan.umsu.ac.id](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01148/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : REZA PRAMANA
 NPM : 2203100064
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Ramadhan 1447 H
 05 Maret 2026 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Reza Pramana

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, February 02, 2026

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160359891





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 763/UND/II.3.AU/UMSU-03/JF/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB



Sp-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGLUJIAN			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGLUJIAN I	PENGLUJIAN II	PENGLUJIAN III	
1	DINA NABILA HASIBULAN	2203100084		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BAYAN DABAT 1 KOTA MEDAN
2	ADELLA SAPUTRI	2203100003		IDA MARTINELLY, SH., MM	WINDA S MELILLA S.Sos., MSP.	RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KESSELKAM DI KOTA MEDAN
3	YOFIA RASMIKA PANJE	2203100009		ANANDA MAHARDIKA S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN PELESTARIAN CAHAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	IRHAM M. ISMAN AL AZHARI	2203100056		IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	WINDA S MELILLA S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN SUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKSIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MANDALING MANTAL
5	PEZZA PRAMAYANA	2203100094		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	WINDA S MELILLA S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

TOTAL : 14 mnt 14 smp

1. Notulis Skripsi

Medan, 19 Januari 1447 H
07 Maret 2025 M



Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Ikom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Reza Pramana
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Mulia 03 Juni 2024
NPM : 2203100064
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Raya Dusun IV Berastagi
No.telepon : 087892221434
E-Mail : Rezapramana4502@gmail.com
Anak ke : 2(dua) dari 3 (bersaudara)

Data Orangtua

Nama Ayah : Misiadi Manggara
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sumini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Raya Dusun IV Berastagi

Riwayat Pendidikan

2010-2016 : SD Negeri 040443 Kabanjahe
2016-2019 : SMP Negeri 1 Kabanjahe
2019-2022 : SMA Swasta Muhammadiyah Kabanjahe
2022-2026 : S-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Dengan Sebenar- Benarnya

Medan, 14 Maret 2026

Reza Pramana